

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjaga keseimbangan pengelolaan perusahaan, perusahaan harus menerapkan prinsip prinsip GCG. Komite audit dibentuk untuk mendukung penerapatan tata kelola yang baik di perusahaan. Tugas pokok dari Komite audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan dalam hal sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan, dan efektivitas fungsi audit internal. Oleh karena itu tugas Komite Audit adalah untuk memastikan bahwa prinsip tata kelola perusahaan yang baik telah diterapkan oleh perusahaan.

Di Indonesia, Peraturan nomor IX 1.5 yang mengatur Komite Audit sesuai dengan lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang menjelaskan bahwa komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan bertugas untuk memberikan pendapat untuk meningkatkan kualitas kinerja dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam tata kelola perusahaan adalah Komite Audit.

Menurut Peraturan Nomor IX 1.5 dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-643/BL/2012, Pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan internal, memastikan ke-efektifitasan auditor internal maupun auditor eksternal, serta memperkuat sifat independensi auditor merupakan tanggung jawab Komite Audit. Menurut *American Society for Quality Control*, kualitas adalah suatu kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat yang dipengaruhi oleh ciri serta sifat suatu produk atau pelayanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas Komite Audit adalah keseluruhan ciri serta sifat Komite Audit yang berpengaruh pada kemampuannya dalam melakukan pengawasan internal, memastikan keefektifitasan auditor internal dan auditor eksternal, serta memperkuat independensi auditor dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Karakteristik Komite Audit diproksikan meliputi independensi, keahlian Komite Audit, aktivitas Komite Audit dan ukuran Komite Audit. Komponen komponen yang diwakilkan oleh keempat indikator tersebut berada dalam Komite Audit yang berguna untuk menggambarkan kualitas yang dimiliki oleh suatu Komite Audit perusahaan. Anggota komite yang tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan pencerminan dari independensi Komite Audit. Pengetahuan akuntansi, keuangan dan audit serta pengalaman tentang tata kelola perusahaan yang dimiliki oleh anggota Komite Audit pencerminan dari keahlian Komite Audit. Frekuensi pertemuan Komite Audit dalam satu tahun untuk membahas masalah terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan dan untuk mendiskusikan pelaporan keuangan dengan auditor eksternal pencerminan dari aktivitas Komite Audit. Sedangkan jumlah anggota Komite Audit pencerminan dari ukuran Komite Audit.

Komite audit yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk mencegah kasus yang marak terjadi di perusahaan yang diakibatkan karena tidak efektifnya penerapan prinsip GCG, seperti kasus *Enron Corporation* yang dikutip dalam berita Liputan6.com pada tanggal 03 April 2014 yang mengalami kebangkrutan karena terjadinya kecurangan laporan keuangan yang disebabkan oleh lemahnya tata kelola perusahaan terkait dengan tidak terciptanya Sistem Pengendalian Internal perusahaan yang baik. Sebenarnya, kebangkrutan Enron dapat dicegah dengan kualitas yang dimiliki oleh Komite Audit. Komite audit yang independen, berkompeten, dan berpengalaman serta menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sangat diperlukan dalam pertanggung jawaban atas setiap elemen di perusahaan dan terciptanya hubungan yang kondusif antara Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan para pemegang saham, tetapi pada kenyataannya Komite Audit tidak berkualitas dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu terdapat kasus lainnya yang dikutip pada berita Tempo.co pada hari Senin 07 Agustus 2006 dikarenakan kualitas Komite Audit yang buruk, seperti yang terjadi pada PT KAI di tahun 2005. Terkait dengan adanya kasus tersebut, dapat diketahui bahwa proses tata kelola yang dijalankan dalam suatu perusahaan tidak berjalan dengan baik dan laporan keuangan yang disajikan tidak mampu menggambarkan suatu keadaan yang benar benar terjadi terkait dengan keuangan

perusahaan yang dapat diketahui bahwa fungsi dari tiap-tiap organ pengawasan disuatu perusahaan tidak mampu melakukan pendektesian terkait adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Hal tersebut merupakan bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan *stakeholder* lainnya, karena diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp63 Miliar. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh auditor eksternal. Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Perbedaan pandangan antara Manajemen dan Komite Audit pada kasus PT KAI terkait dengan penolakan dan penyetujuan penandatanganan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal. Dari adanya suatu hal tersebut Komite Audit meminta untuk dilakukan peninjauan ulang atas audit agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada.

Proses audit merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus PT KAI dikarenakan Komite Audit tidak ikut serta dalam proses penunjukkan auditor. Hal tersebut dapat memicu kecurangan laporan keuangan dan Komite Audit juga tidak menanyakan hal mengenai proses audit tersebut, selain itu adanya ketidakyakinan manajemen akan laporan keuangan yang telah disusun.

Apa pun alasannya, masalah ini mungkin disebabkan karena Komite audit tidak memenuhi indikator kualitas yang baik, yaitu independensi Komite Audit dan aktivitas Komite Audit seperti tidak mendiskusikan pelaporan keuangan dengan Auditor Eksternal dan tidak melakukan pengawasan terkait dengan suatu potensi yang dapat menyebabkan suatu konflik kepentingan dan adanya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dan manajemen perusahaan. Oleh karena itu, Komite Audit yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk memainkan segala peran yang aktif dalam mengoordinasikan semua tahap proses audit, dimulai dengan penunjukan, pemrograman, evaluasi, dan penyerahan hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris

sehingga dapat menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan dapat meminimalkan resiko terjadinya kecurangan laporan keuangan. Kasus ini berkaitan dengan pendapat *Dechow et al.* (1996) yang menyebutkan bahwa kemungkinan besar terjadinya kecurangan laporan keuangan terkait dengan skandal di perusahaan terjadi karena kemungkinan besar perusahaan tidak mempunyai Komite Audit atau Komite Auditnya tidak bekerja secara efektif dan efisien dalam setiap rapat yang dilaksanakan.

Kualitas Komite Audit juga dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Menurut Fama-Jensen (1983) *agency-cost* yang semakin tinggi disebabkan karena semakin besar ukuran perusahaan dan tentu saja membutuhkan struktur kepengurusan yang lebih luas dan kompleks. Pengawasan internal dan eksternal sangat diperlukan diperusahaan, karena dengan adanya pengawasan dapat mengurangi suatu peluang dalam menimbulkan risiko kecurangan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas pengawasan internal perusahaan, Dewan komisaris membutuhkan Komite Audit yang berkualitas.

Dilihat dari segi kepemilikan manajerial, potensi kepemilikan manajerial dipengaruhi oleh sejauh mana kualitas yang ditunjukkan oleh Komite Audit. Jensen dan Meckling (1976) mengatakan bahwa konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik saham dengan pemilik saham lainnya dapat dikurangi dengan kenaikan kepemilikan manajerial. Hal ini dikarenakan dengan adanya kepemilikan saham oleh manajer, maka manajer akan ikut memperoleh manfaat secara langsung atas keputusan-keputusan yang diambilnya dan akan menanggung risikonya apabila keputusan tersebut salah. Sehingga dengan meningkatnya kepemilikan manajerial maka akan menurunkan permintaan pengawasan oleh Komite Audit, maka, perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial yang besar cenderung akan menurunkan kualitas Komite Audit.

Suatu kualitas Komite Audit dipengaruhi oleh tingkat *leverage* perusahaan. Jika *leverage* perusahaan tinggi, maka pembiayaan yang berasal dari utang juga tinggi. Jika tingkat *leverage* perusahaan tinggi, maka kepercayaan *stakeholders* akan menurun, hal ini dikarenakan perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi berpotensi untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Sehingga untuk mengembalikan kepercayaan *stakeholders*, perusahaan perlu membentuk Komite

Audit yang memiliki keahlian dibidang akuntansi dan keuangan guna menjamin bahwa proses monitoring dalam perusahaan telah berjalan dengan baik.

Selain itu kualitas Komite Audit dapat dipengaruhi oleh kompetensi Dewan Komisaris sesuai dengan pendapat Cadbury Report (1992) yang menyatakan bahwa hal yang sangat penting dalam menghasilkan Dewan Komisaris yang efektif dipengaruhi oleh kompetensi anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, Dewan Komisaris yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan diprediksi akan lebih efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan di perusahaan. Salah satunya, pengawasan Dewan Komisaris kepada Komite Audit terkait tugas Komite Audit dalam menelaah laporan keuangan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan diprediksi akan membentuk Komite Audit yang berkualitas.

Penelitian terdahulu mengenai kualitas Komite Audit antara lain Lies Setyo Sri Rahayu (2014) yang dalam penelitiannya kualitas Komite Audit diprosikan dalam independensi, kompetensi, aktivitas, dan ukuran Komite Audit. Serta menemukan bahwa kepemilikan manajerial secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kualitas Komite Audit. *Leverage* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas Komite Audit. Sedangkan ukuran perusahaan dan kompetensi Dewan Komisaris secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas Komite Audit.

Hasil penelitian Riyantini Amalia Paramitha (2013) yang menemukan bahwa kualitas Komite Audit dapat diperkuat dengan meningkatkan independensi, kompetensi, aktivitas, dan ukuran Komite Audit. Selain itu *leverage* perusahaan secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas Komite Audit, sedangkan kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas Komite Audit.

Selain itu menurut Baxter (2010), kualitas Komite Audit dapat diperkuat dengan meningkatkan independensi, kompetensi, aktivitas dan ukuran mereka. Dan menemukan bahwa ukuran perusahaan dan kompetensi Dewan Komisaris memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas Komite Audit. Sedangkan *leverage* dan kepemilikan manajerial tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas Komite Audit.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian yang akan diajukan adalah “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, *Leverage*, dan Kompetensi Dewan Komisaris Terhadap Kualitas Komite Audit”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kualitas Komite Audit?
- b. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kualitas Komite Audit?
- c. Apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap kualitas Komite Audit?
- d. Apakah kompetensi Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap kualitas Komite Audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas Komite Audit.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kualitas Komite Audit.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap kualitas Komite Audit.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi Dewan Komisaris terhadap kualitas Komite Audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain:

a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat informasi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya yang mengambil variabel yang sama yakni ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, *leverage*, dan kompetensi Dewan Komisaris.

b. Aspek Praktis

1. Pihak Regulator

Bagi regulator, sebagai wacana mengenai pentingnya pengawasan atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik oleh Komite Audit.

2. Pihak Manajemen

Bagi Manajemen, sebagai bahan pertimbangan tentang pentingnya memiliki Komite Audit yang berkualitas guna menjamin terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik.

3. Pihak Investor

Bagi Investor, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menilai baik-buruknya tata kelola perusahaan.

